



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI RAHA

JLM.H.THAMRIN NO.33 RAHA KAB. MUNA
SULAWESI TENGGARA

<http://www.pn-raha.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode: 1 April 2026 s/d 30 Juni 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS BERJALAN

4,00 / 99,98 %

| | | |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| JUMLAH | 101 RESPONDEN | |
| GENDER | Laki-Laki : 55 org | Perempuan : 46 org |
| PENDIDIKAN | Tidak/Belum Sekolah : 0 org | Diploma 2 : 0 org |
| | SD : 1 org | Diploma 3 : 12 org |
| | SMP : 1 org | Sarjana S1 : 36 org |
| | SMU : 46 org | Magister S2 : 1 org |
| | Diploma 1 : 4 org | Doktor S3 : 0 org |
| PEKERJAAN | PNS : 15 org | Wiraswasta : 46 org |
| | TNI : 0 org | Wirausaha : 20 org |
| | Polri : 4 org | Tenaga Kontrak : 9 org |
| | Lainnya : 7 org | |

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Rata-Rata per Unsur:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? | 3.99 |
| 2. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? | 4.00 |
| 3. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ? | 4.00 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah:

Berdasarkan hasil survei dan kesimpulan yang telah disampaikan, ada 3 (tiga) fokus perbaikan/tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil survei sebagai berikut : 1. Untuk Memperbaiki Indikator Perbuatan Curang,, direkomendasikan: • Agar petugas PTSP dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Raha sekarang sudah tidak ada lagi namanya KKN dalam hal pelayanan publik. 2. Untuk memperbaiki Indikator Percaloan, direkomendasikan: • Petugas PTSP maupun petugas informasi selalu memberitahukan biaya yang dikenakan atas pengguna pelayanan merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 3. Untuk memperbaiki Indikator Transparansi Biaya, direkomendasikan: • Ketua Pengadilan menegaskan bawah praktek adanya biaya yang tidak disebutkan dalam pemberian layanan publik dan penanganan perkara yang ada di Pengadilan Negeri Raha sudah tidak terjadi.

* Terima kasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki kualitas pelayanan.



1 Juli 2026

Ketua Pengadilan

Achmad Wahyu Utomo
Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.